



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI KOMISI II DPR – RI**  
**KOTA PRAHA**  
**REPUBLIK CEKO**  
**PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022 – 2023**  
**25 JUNI - 1 JULI 2023**

.....

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Di Indonesia penataan ruang telah ditempatkan sebagai salah satu komponen penting yang turut menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan suatu wilayah, khususnya dalam rangka proses pembangunan berkelanjutan. Persoalan penataan ruang menjadi isu krusial mengingat urgensi keberadaan ruang yang terbatas dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin tinggi akibat aktivitas manusia yang tidak terbatas. Ketika manusia dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks, maka potensi penyalahgunaan ruang wilayah menjadi semakin terbuka, khususnya dalam rangka pemenuhan berbagai bentuk kebutuhan masyarakat luas. Kondisi tersebut menyebabkan rentan terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat mengancam ketahanan pangan, timbulnya bencana alam, dan kerusakan lingkungan. Sampai hari ini masih terdapat banyak permasalahan dalam upaya penataan ruang di Indonesia. Mulai dari tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, konflik kepentingan, tidak sinkronnya koordinasi tata ruang antar daerah, belum jelasnya mekanisme pengendalian, alih fungsi lahan, dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan wilayah di Indonesia yang secara umum masih berlangsung secara alamiah. Dalam artian pola berkembangnya tidak memiliki arah dan perencanaan yang terpadu. Oleh karena itu dibutuhkan upaya penanggulangan melalui berbagai peraturan untuk memastikan bahwa ruang wilayah dapat tertata dengan baik serta difungsikan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Aspek regulasi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Regulasi terdahulu yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dianggap membatasi penciptaan dan pengembangan bisnis. Berdasarkan Indeks *Ease of Doing Business* (EoDB) Tahun 2020 Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara. EoDB merupakan survey yang dilakukan oleh *World Bank* untuk mengurutkan negara-negara berdasarkan tingkat kemudahan berusaha. Di lingkup negara ASEAN peringkat Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang ditetapkan dengan tujuan untuk percepatan investasi dan pelaksanaan pembangunan turut berdampak pada penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Sebelumnya, kebijakan terkait tata ruang yang dianggap berlapis-lapis serta panjangnya proses birokrasi perizinan pemanfaatan ruang dianggap sebagai beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Di Indonesia, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) merupakan institusi pemerintah yang

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan turunan dari UU Cipta kerja terkait urusan tata ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja, diharapkan dapat dilakukan pemangkasan terhadap kebijakan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan pembangunan sehingga dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Sebagai upaya mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan Tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Sejak berlakunya UU Cipta Kerja, aturan mengenai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang mengalami perubahan. Penyederhanaan perizinan berusaha dilakukan dengan menggantikan izin lokasi dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). KKPR dapat diperoleh pelaku usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk berbagai skala dan tingkat risiko kegiatan usaha. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, antara lain:

- 1) Masih rendahnya penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh daerah yang menjadi landasan utama dalam penerbitan KKPR. Ketiadaan RDTR akan sangat berpotensi mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan iklim investasi.
- 2) Minimnya ketersediaan dan kualitas tenaga ahli dalam bidang penataan ruang sebagai upaya meningkatkan kualitas produk/dokumen rencana tata ruang. Penyusunan dokumen tata ruang didahului oleh kajian akademik yang meliputi analisis aspek fisik, lingkungan, ekonomi, sosial budaya.
- 3) Forum Penataan Ruang (FPR) belum terbentuk secara merata di seluruh Indonesia. FPR beranggotakan perwakilan dari pemerintah dan masyarakat yang bertugas memberikan pertimbangan untuk persetujuan dan rekomendasi KKPR serta pertimbangan jika terjadi perubahan RDTR.

Berbagai permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan penataan ruang di Indonesia sejak berlakunya UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI menganggap penting untuk melakukan kunjungan ke negara lain guna memperoleh data dan pengetahuan dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen dan fungsi pengawasan terhadap pembentukan sistem perencanaan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar dari berbagai data maupun hasil pengamatan secara langsung yang didapatkan dari hasil kunjungan kerja dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan yang berharga untuk memastikan agar Indonesia bisa memiliki sistem perencanaan tata ruang yang terpadu sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keharmonisan, keseimbangan dan keserasian pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memelihara ekosistem lingkungan dan alam.

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kota Praha Republik Ceko berjumlah 13 orang anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung beserta anggota tim yang terdiri dari:

<b>NO.</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>	<b>N A M A</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	A-270	H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung	Ketua Tim Delegasi / Ketua Komisi II / F-PG
2.	A-15	H. Yanuar Prihatin, M.Si	Wakil Ketua Komisi II / F-PKB
3.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M	Wakil Ketua Komisi II / F-PPP
4.	A-183	Riyanta, S.H.	Anggota Delegasi / F-PDIP
5.	A-259	Ir. Hugua	Anggota Delegasi / F-PDIP
6.	A-310	Agung Widyantoro, S.H., M.Si.	Anggota Delegasi / F-PG
7.	A-75	H. Ahmad Muzani	Anggota Delegasi / F-Gerindra
8.	A-376	Aminurokhman, S.E., M.M	Anggota Delegasi / F-Nasdem
9.	A-021	Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.	Anggota Delegasi / F-PKB
10.	A-528	Rezka Oktoberia	Anggota Delegasi / F-PD
11.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota Delegasi / F-PKS
12.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota Delegasi / F-PAN
13.	A-473	H. Iip Miftahul Choiry, SPdi	Anggota Delegasi / F-PPP
14.	----	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Sekretariat Komisi II
15.	----	Fadhilah Afifah, S.M.	Sekretariat Komisi II
16.	----	Anggia Michel, S.IP., M.A.P.	Tenaga Ahli Komisi II

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI dan 1 (satu) Tenaga Ahli Komisi II DPR RI.

## **B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI**

Kunjungan kerja luar negeri dilaksanakan pada tanggal 25 Juni - 1 Juli 2023. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pembangunan Regional Republik Ceko dan Institut Perencanaan dan Pengembangan Kota Praha dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan. Adapun anggaran untuk kegiatan kunjungan kerja ini dibebankan kepada APBN, sebagaimana telah tercantum dalam DIPA Komisi II DPR RI Tahun Anggaran 2023.

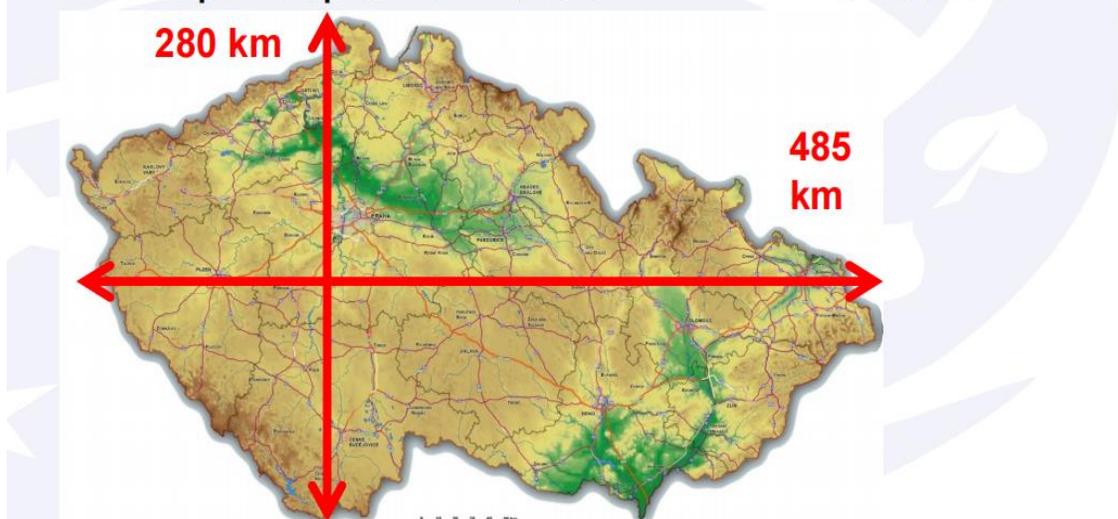
## II. HASIL KUNJUNGAN

### A. Kementerian Pembangunan Regional Republik Ceko

Ketua dan anggota delegasi Indonesia diterima oleh Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D dan Ing. Roman Vodny, Ph.D sebagai perwakilan dari Kementerian Pembangunan Regional Republik Ceko di Baroque Refectory atau Ruang Makan Barok yaitu ruang makan bersama para biarawan di biara Kristen yang dibangun pada akhir abad ke-17 sebagai aula perwakilan utama biara Dominikan yang paling penting di Ceko. Bentuk saat ini berasal dari rekonstruksi Barok awal. Pengarangnya adalah Carlo Lurago. Hampir lima puluh lukisan, adegan alkitabiah dan legendaris dengan motif makanan mendominasi.

## Czech Republic x Republic of Indonesia

▪ Area:	78,871 km <sup>2</sup>	1,904,569 km <sup>2</sup>
▪ Inhabitants:	10.8 million	277.7 million
▪ GDP per capita:	\$ 27,609	\$ 15,855



Perbandingan singkat luas wilayah dan populasi Republik Ceko dan Indonesia. Republik Ceko dengan luas wilayah 78.871 km<sup>2</sup> dan Indonesia dengan luas wilayah 1.904.569 km<sup>2</sup>. Populasi Republik Ceko sebanyak 10.8 juta penduduk sementara populasi Indonesia sebanyak 277.7 juta penduduk. Kalau populasi penduduk di ibukota Praha saja sebanyak 1.2-1.3 juta penduduk.

Kementerian Pembangunan Regional berada sejak tahun 1996 yang merupakan bagian dari pemerintah pusat yang memiliki kewenangan sebagai berikut: kebijakan regional, kebijakan perumahan, pengembangan persediaan perumahan, perencanaan tata ruang, peraturan bangunan, pengambilalihan, kebijakan investasi, pariwisata, dan pelayanan pemakaman. Dasar hukum perencanaan tata ruang di republik Ceko saat ini seperti sedang berada di perempatan jalan. Saat ini Kementerian Pembangunan Regional masih menggunakan Undang-Undang No. 183/2006 Kol. tentang perencanaan tata ruang dan peraturan bangunan (UU Bangunan) yang memiliki peraturan turunan yaitu:

- a) Keputusan No. 500/2006 Kol. tentang analisis spasial dokumen perencanaan tata ruang dan metode pencatatan kegiatan perencanaan tata ruang

- b) Keputusan No. 501/2006 Kol. tentang persyaratan umum untuk penggunaan tanah

Akan tetapi Kementerian Pembangunan Regional akan menerbitkan Undang-Undang No. 283/2021 Kol. tentang kota dan negara perencanaan kota dan kode bangunan (Undang-Undang Bangunan) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2024.

Kementerian Pembangunan Regional juga melakukan pekerjaan metodologis pada perencanaan tata ruang dan urbanisme, proses perizinan perencanaan, peraturan bangunan dan pengambilalihan, memberikan panduan dan merampingkan pekerjaan administrasi negara dan melaksanakan kewenangan perencanaan tata ruang dan bangunan kantor. Di bidang perencanaan tata ruang dan peraturan bangunan, tugas Kementerian Pembangunan Regional, antara lain:

- a) menyusun kebijakan pembangunan tata ruang yaitu Kebijakan Pembangunan Tata Ruang Republik Ceko;
- b) menyusun dan mengawasi implementasi Kebijakan Arsitektur dan Budaya Bangunan Republik Ceko;
- c) menyimpan catatan kegiatan perencanaan dan memastikan pekerjaan Dewan Penasihat untuk pengajuan peraturan bangunan;
- d) menilai rancangan prinsip-prinsip pembangunan yang diperoleh dari daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri; dan
- e) secara umum mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan rencana tata ruang.

Hirarki administrasi pemerintahan di Republik Ceko yaitu negara, daerah, kotamadya. Republik Ceko terdiri dari 14 wilayah dan 6258 kotamadya. Pemerintah kota dan daerah secara terus menerus berkewajiban untuk memantau dokumentasi perencanaan. Kota atau daerah harus mengubah rencana mereka agar sesuai dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Bagian-bagian dari rencana yang bertentangan tidak berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perencanaan dan Bangunan, pemerintah pusat menetapkan prioritas nasional dan tujuan pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Tata Ruang yang mengikat untuk semua tingkat perencanaan tata ruang yang lebih rendah. Dokumen ini disetujui oleh pemerintah dan dapat ditinjau setiap empat tahun. Di tingkat regional, dewan regional menyetujui Prinsip Pembangunan Tata Ruang sebagai dokumen yang mengikat, yang menentukan area dan sumbu pengembangan, menunjukkan hierarki pusat dan menentukan area dan koridor untuk proyek infrastruktur yang memiliki kepentingan nasional atau regional.

Di tingkat lokal, sebagian besar komunitas/kota mengembangkan rencana wilayah (penggunaan lahan) lokal dan beberapa di antaranya juga merinci rencana zonasi/peraturan untuk beberapa wilayah lokal. Dewan lokal masing-masing menyetujui rencana tersebut. Struktur instrumen perencanaan tunduk pada hierarki yang kuat, dimana rencana pada tingkat teritorial yang lebih rendah harus memenuhi semua persyaratan rencana pada tingkat yang lebih tinggi. (jika prinsip pembangunan tata ruang mengadopsi peraturan baru yang berlaku untuk kotamadya, kotamadya harus mengubah rencana daerah untuk mematuhi tingkat perencanaan yang lebih tinggi).

Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Republik Ceko yang berkaitan dengan karakter unik wilayah dan struktur permukiman Republik Ceko mempertimbangkan persyaratan untuk pengembangan tata ruang yang berkelanjutan dan kohesi wilayah yang dihasilkan untuk Republik Ceko dari keanggotaan Uni Eropa, perjanjian internasional, keanggotaan dalam organisasi internasional (PBB,

OECD, Dewan Eropa) dan perjanjian internasional lainnya, perjanjian dan konvensi yang terkait dengan pengembangan tata ruang, di mana Republik Ceko adalah salah satu pihak yang menandatangani. Kebijakan Pembangunan Tata Ruang Republik Ceko juga mempertimbangkan rencana yang terkandung dalam dokumen pembangunan tata ruang negara-negara tetangga. Prioritas nasional dalam perencanaan tata ruang untuk memastikan pembangunan tata ruang yang berkelanjutan (selanjutnya sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Bangunan menentukan persyaratan untuk menentukan tujuan dan tugas perencanaan tata ruang yang dirumuskan secara umum dan menentukan strategi dan kondisi dasar untuk pelaksanaannya dalam kegiatan perencanaan tata ruang wilayah dan kotamadya dan pengembangan konsep departemen dengan konsekuensi untuk wilayah tersebut.

Kebijakan Pengembangan Tata Ruang terdiri dari: Dokumen yang diperlukan, dokumen yang mengikat, disiapkan oleh kementerian, disetujui oleh pemerintah, seluruhnya Republik Ceko, Skema - A4. Rencana Pengembangan Tata Ruang terdiri dari: Dokumen yang diperlukan, Dokumen yang mengikat, Disiapkan oleh kementerian, Disetujui oleh pemerintah, Seluruh Republik Ceko Transportasi dan infrastruktur teknis, sistem stabilitas ekologi, Rencana 1: 200.000 belum siap, diharapkan pada kuartal kedua tahun 2024. Prinsip-prinsip Pengembangan terdiri dari: Dokumen yang diperlukan, Dokumen yang mengikat, Disiapkan oleh otoritas regional, Disetujui oleh Dewan Daerah, 14 x untuk seluruh wilayah, Rencana 1 : 100.000 (1 : 50,000 / 1 : 200,000). Rencana Lokal (Penggunaan Lahan) terdiri dari: Dokumen yang tidak diperlukan, Dokumen yang mengikat, Disetujui oleh Dewan Lokal, Untuk seluruh wilayah, seluruh wilayah suatu komunitas, Rencana 1 : 5.000 (1 : 10,000), 94 % dari masyarakat memiliki rencana lokal. Rencana Regulasi terdiri dari: dokumen yang tidak diwajibkan, dokumen yang mengikat, untuk area tertentu di kotamadya atau wilayah tertentu, rencana 1 : 1.000 (1 : 2.000 / 1 : 500). Studi Perencanaan terdiri dari: Dokumen yang tidak diwajibkan dan tidak mengikat, Desain alternatif untuk area tertentu, Pembentukan konsepsi Kawasan, Studi lanskap, Dasar untuk perubahan rencana lokal atau untuk rencana peraturan.

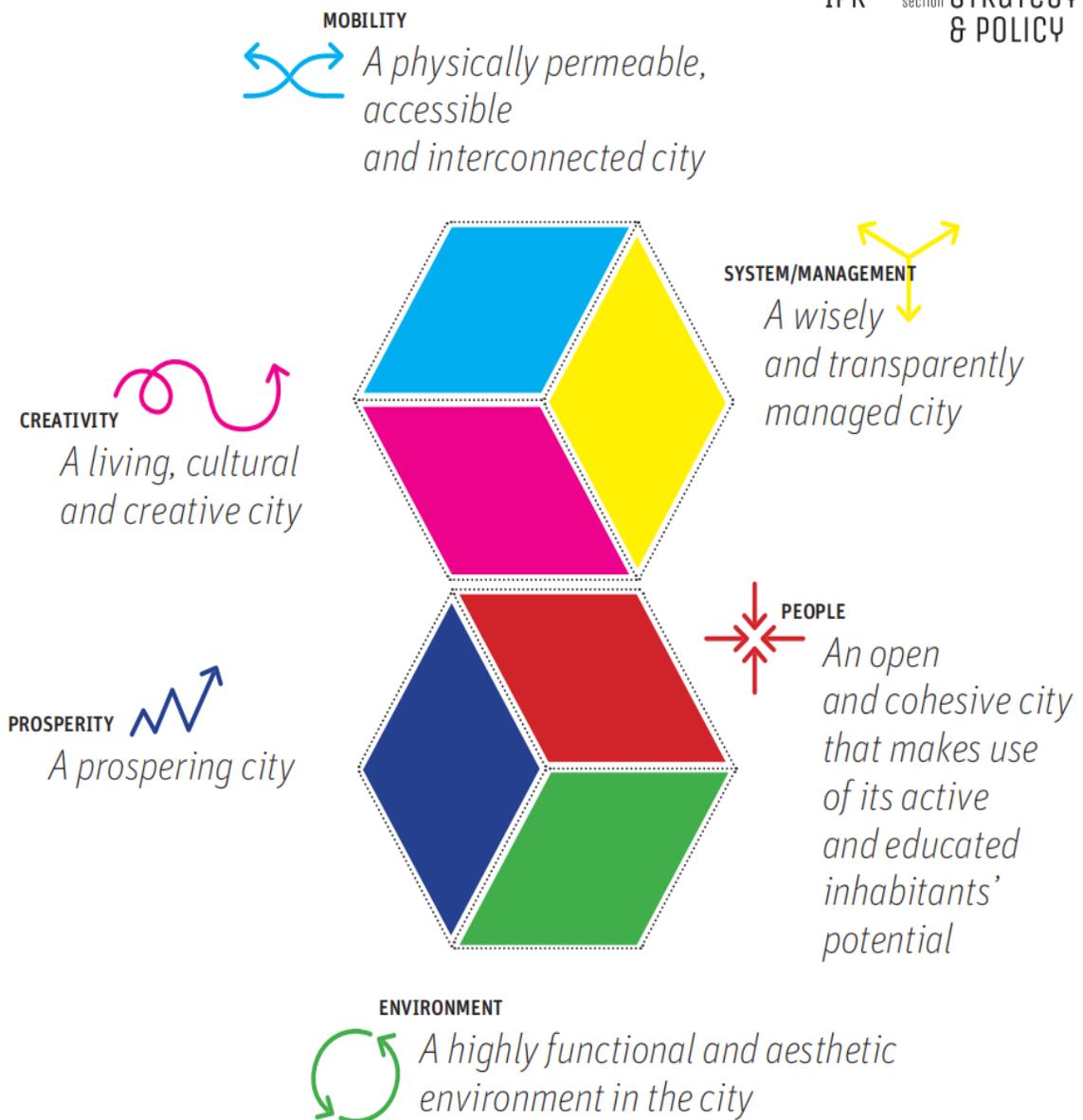
## **B. Institut Perencanaan dan Pengembangan Kota Praha**

Luas wilayah Ibukota Praha sekitar 496 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.3 juta jiwa. Kepadatan penduduk sebanyak 2.600 orang per Km<sup>2</sup> sedangkan di Jakarta kepadatan penduduk sebanyak 14.000 orang per Km<sup>2</sup>. Salah satu tujuan Institut Perencanaan dan Pembangunan Kota Praha (IPR Praha) untuk Kota Praha adalah menambah kepadatan ruang. Selama 20 tahun terakhir Kota Praha belum bertambah kepadatan penduduknya, hal ini bisa jadi pertanda tidak baik sehingga kami ingin berkembang (kepadatan bertambah). Salah satu cara menambah kepadatan Kota Praha adalah membangun area transformasi seperti wilayah bekas pabrik yang akan dijadikan perumahan modern. IPR Praha fokus pada ruang publik yang dalam pelaksanaannya memiliki pedoman ruang publik yang berdasarkan prinsip-prinsip dan rekomendasi penciptaan ruang publik. Pada tahun 2008 Kota Praha menyambut 8 juta orang turis namun pada saat pandemi covid 19 yang lalu jumlah turis sangat menurun. Kota Praha memiliki 1 Ibukota Praha dan 57 bagian wilayah kota.

IPR Praha merupakan organisasi non profit yang dibiayai Pemerintah Kota Praha yang memiliki tugas menyusun perencanaan tata ruang di Kota Praha di bidang arsitektur, infrastruktur, perumahan, dan urbanisme. Sumber daya manusia di IPR

Praha merupakan pegawai Pemerintah Kota Praha. Lembaga ini bertugas menyusun dan mengkoordinasikan dokumen-dokumen di bidang-bidang berikut: perencanaan dan pengembangan strategis dan spasial, ruang publik, transportasi, hal-hal teknis, dan infrastruktur lanskap dan ekonomi. Dokumen-dokumen tersebut termasuk Peraturan Bangunan Praha, Konsep Tepi Air Praha dan Manual Desain Ruang Publik Praha. Proyek-proyek utama termasuk pembuatan rencana penggunaan lahan baru untuk Praha "Rencana Metropolitan" dan implementasi Rencana Strategis Praha.

Perencanaan tata ruang disetujui pada tahun 1999 yang masih berlaku hingga saat ini. Rencana tersebut sudah cukup tua, tidak fleksibel, dan tidak menggambarkan situasi saat ini sehingga Kota Praha membutuhkan rencana pembaruan. IPR Praha sedang menyusun rencana metropolitan yang sedang dalam tahap pembahasan sehingga memungkinkan terciptanya sistem yang baru, terintegrasi dan kohesif yang sesuai dengan kebutuhan kota metropolitan di abad ke-21. Ke depan rencana metropolitan akan menggantikan perencanaan tata ruang tahun 1999. Dalam rencana metropolitan Ibukota Praha terbagi menjadi puluhan lokasi di mana setiap lokasi memiliki ciri khas tersendiri dan ditetapkan apa saja yang harus dikembangkan di wilayah tersebut. Rencana metropolitan juga akan menetapkan batas tinggi bangunan yang baru. Sarana penting untuk mencapai perencanaan dan tata kelola kota yang baik adalah komunikasi terbuka dan kerja sama aktif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan kota. Oleh karena itu, IPR Praha telah mulai menyelenggarakan seminar dan lokakarya untuk berbagai distrik kota serta mengadakan kuliah umum.



### C. Hubungan Bilateral republic Indonesia dan Republik Ceko

Sejarah hubungan bilateral RI-Ceko dimulai pada saat pemerintah Cekoslovakia mendirikan Konsul Kehormatan di Batavia pada tahun 1924. Sedangkan Pemerintah Indonesia mendirikan “*Indonesian Information Service*” di jalan Slezska 12, Praha 2 pada tahun 1948. Pemerintah Cekoslovakia mengakui Indonesia sebagai suatu Negara berdaulat pada 2 Februari 1950, Cekoslovakia membuka Konsulat Jenderal di Jakarta secara resmi pada 7 Maret 1950 dan dinaikkan statusnya menjadi Kedutaan Besar pada tahun 1957. Pada 31 Desember 1992, RI memberikan pengakuan kepada Republik Ceko yang berpisah secara damai dari Slovakia. Hubungan diplomatik RI-Ceko dibuka pada 1 Januari 1993. Hubungan politik antara Indonesia dan Ceko berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sistem politik di Ceko yang terbuka dan kebijakan Indonesia yang lebih memperhatikan negara-negara di wilayah Eropa Tengah dan Timur.

Dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-5 Indonesia-Ceko yang dilaksanakan pada 10 November 2021 di Brno, Republik Ceko, Indonesia dan Ceko sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi. Pada pertemuan tersebut, kedua negara membahas sektor-sektor prioritas kerjasama, yaitu: industri, energi dan sumber-sumber terbarukan, pertambangan, infrastruktur dan transportasi, kedirgantaraan, pertahanan, lingkungan, industri kesehatan dan pariwisata. Keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi Covid-19 di mana *positivity rate* di Indonesia saat ini berada jauh di bawah *positivity rate* *World Health Organization*

(WHO). Salah satu faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah tingkat vaksinasi di Indonesia yang semakin tinggi dan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan, serta peningkatan kapabilitas Pemerintah dalam melakukan *tracing* dan *tracking*. Untuk itu, Indonesia mengusulkan pembukaan *travel corridor arrangement* (TCA) antara Indonesia dan Ceko untuk memfasilitasi kunjungan bisnis yang esensial. Indonesia juga mengusulkan pengakuan sertifikat vaksin secara timbal balik mengingat vaksin yang digunakan di Indonesia telah memperoleh persetujuan dari WHO untuk penggunaan darurat. Ceko menyambut positif usulan TCA tersebut dan pembahasan akan dilakukan saat Konsultasi Bilateral kedua negara pada awal Desember 2021.

Kedua negara juga sepakat mendorong penyelesaian negosiasi *Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) yang telah berlangsung sejak 2016. Dalam kaitan tersebut, Indonesia mengharapkan peranan Ceko dalam negosiasi tersebut khususnya saat keketuaan Ceko dalam Uni Eropa pada paruh kedua 2022. Indonesia dan Uni Eropa memiliki kesamaan kepentingan dalam beberapa isu, antara lain demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Kesamaan kepentingan tersebut diharapkan dapat membantu kedua pihak untuk *move forward* dalam perundingan IEU-CEPA.

Pada tahun 2022, volume perdagangan bilateral kita mencapai 254,9 juta dolar AS, meningkat signifikan sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya. Meski volume perdagangan di antara kedua negara saat ini mungkin tidak mencapai potensi maksimalnya, terdapat minat yang semakin besar untuk menjajaki peluang baru untuk ekspansi perdagangan, khususnya di bidang-bidang seperti otomotif, permesinan, bahan kimia, gas dan minyak. Beberapa area kerjasama yang diidentifikasi dan akan di dorong ke depannya adalah kerjasama kesehatan, khususnya untuk obat – obatan terapeutik, riset dan teknologi pendeteksian virus dan *mobile hospitals*, *renewable energy (hydro energy)*, digitalisasi ekonomi. Selain itu, telah terjadi peningkatan kerja sama dalam industri pertahanan dan keamanan dengan eksplorasi *joint venture* dan transfer teknologi yang sedang dilakukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan mempromosikan kemitraan yang strategis, termasuk pengamanan *cyber* dan kerjasama alutsista yang merupakan kerjasama *flagship* kedua negara.

Pertemuan di Kementerian Pembangunan Regional Republik Ceko



Pertemuan di Institut Perencanaan dan Pengembangan Kota Praha





Pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha





### III. CATATAN RAPAT

1. Pemerintah pusat di Republik Ceko menetapkan prioritas pembangunan dan tujuan pembangunan dalam kebijakan perencanaan tata ruang. Peraturan bersifat mengikat untuk semua tingkat perencanaan tata ruang yang lebih rendah. Pemerintah daerah dan pemerintah kota harus mengubah rencana mereka menjadi sesuai dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Perencanaan tata ruang yang bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat tidak berlaku.
2. Pemerintah Republik Ceko sangat menjaga warisan budaya dan arsitektur bangunan yang telah ada sejak abad 19. Perencanaan tata ruang di Republik Ceko sangat memperhatikan pelestarian warisan budaya dan arsitektur bangunan.
3. *Gross Domestic Product* (GDP) Republik Ceko sebesar \$27.609 tidak hanya berasal dari sektor pariwisata tetapi juga dari sektor industri (pertambangan, besi baja, kristal, dan lain-lain).
4. Rencana Metropolitan Kota Praha yang sedang dalam tahap pembahasan sangat fokus pada ciri khas daerah masing-masing, menegaskan pelestarian budaya dan bangunan harus dipertahankan, serta perencanaan tata ruang dilakukan secara digital.
5. Perubahan perencanaan tata ruang Kota Praha dilakukan ketika terdapat hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Namun dalam pelaksanaannya perubahan kebijakan terkendala proses birokrasi dan biaya yang sangat besar.
6. Kebijakan perencanaan tata ruang di Indonesia dilakukan untuk meningkatkan investasi. Namun di Republik Ceko kebijakan perencanaan tata ruang lebih fokus pada mempertahankan situs-situs bersejarah dan pelestarian budaya.
7. Kendala yang dihadapi dalam sistem tata ruang di Kota Praha yaitu jika terdapat lahan pemukiman yang baru akan tetapi tidak memiliki infrastruktur pendukung yang memadai seperti sekolah, rumah sakit, transportasi, dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kota

memiliki perencanaan tata ruang masing-masing yang belum terintegrasi secara optimal.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian laporan hasil kunjungan kerja luar negeri Komisi II DPR RI ke Kota Praha republic Ceko pada tanggal 25 Juni-1 Juli 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, Juni 2023**  
**KETUA TIM KUNJUNGAN**  
**KOMISI II DPR RI**

**H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung**